

Editor:

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.

Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.

Syaifullah, S.Pd., M.Si.

Muhammad Mona Adha, M.Pd.

Candra Cuga, M.Pd.



Laboratorium PKn FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PENGUATAN KOMITMEN AKADEMIK DALAM MEMPERKOKOH JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4 April 2015

Auditorium Gedung Nu'man Somantri (FPIPS)

Universitas Pendidikan Indonesia



Tri walixuni kgsri.
PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PENGUATAN KOMITMEN
AKADEMIK DALAM
MEMPERKOKOH JATIDIRI PKn**

EDITOR:

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.
Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.
Syaifullah, S.Pd., M.Si.
Muhammad Mona Adha, M.Pd.
Candra Cuga, M.Pd.



**LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Sambutan Rektor	v
Sambutan Dekan FPIPS	vi
Sambutan Ketua Departemen PKN FPIPS	vii
Sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) AP3KNI	viii
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar dan Rakernas AP3KNI Tahun 2015	ix
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKN) UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA: REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN Udin S. Winatapura, Riza Alrahman	1
2. PERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Soedijarto	24
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Sjamsi Pasandaran	36
4. PENGEMBANGAN <i>CIVIC INTELLIGENCE</i> BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR Masrukhi dan Tommi Yuniawan	52
5. REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dasim Budimansyah	66
6. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PKN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI BERBASIS KKN Sapriya	76
7. DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA Cecep Darmawan	95
8. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DARI KETERLIBATAN WARGANEGARA (<i>CIVIC ENGAGEMENT</i>): TINJAUAN TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRUSAHA (PMW) Syaifullah	102
9. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN), Apeles Lexi Lonto	121

10. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGEMBANGAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN <i>SOFT SKILLS</i> MAHASISWA Asep Mahpudz.....	130
11. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Atmawarni	140
12. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : UPAYA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN MAHASISWA Aziz Taufik Hirzi.....	146
13. PERAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN ANTARA PANCASILA SSEBAGAI “RUH” DAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI “BADAN” Bartolomeus Samho.....	152
14. STUDI KORELASI ANTARA PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STKIP SINTANG Dessy Triana Relita.....	165
15. MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (<i>CIVIC VIRTUE</i>) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Dikdik Baehaqi Arif.....	175
16. MAPPING KESADARAN HUKUM MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Studi Kasus Perilaku Mahasiswa di Universitas X) M. Yahya Arwiyah.....	186
17. PENGUASAAN KONSEP IPS DALAM UPAYA PEMBERIAN PEMBEKALAN PEMECAHAN MASALAH SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR Eliana Yunitha Seran.....	190
18. TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SIMEULUE (<i>SMONG</i>) DALAM PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Hasbi Ali.....	201
19. REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI Hasan Suryono.....	211
20. PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Indriyana Dwi Mustikarini	219
21. PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 M. Sulthon.....	226

22. AKTUALISASI PENDIDIKAN KETELADANAN DALAM MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA Maimun	242
23. SEMANGAT KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Mardawani.....	251
24. BERANI MENGAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGI PERAN DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN Miming Karmilah	261
25. KEMAMPUAN SISWA DALAM MANAJEMEN MITIGASI BENCANA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI <i>CIVIC SKILL</i> WARGA NEGARA Muhammad Mona Adha	276
26. KEPEMIMPINAN DALAM INTEGRITAS PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PANCASILA Nana Setialaksana.....	294
27. PENEGUHAN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI Nurul Zuriah.....	301
28. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA GLOBAL Runik Machfiroh	312
29. OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI Rusli Yusuf	318
30. KONTRIBUSI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER PADA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sabarudin.....	328
31. PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIA DI KELAS VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Sapto Purnomo	336
32. REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA Siska Diana Sari	341

33. PENGUATAN JATIDIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK Sri Kunarsih.....	350
34. MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN HUKUM YANG HOLISTIK Sumaryati.....	354
35. SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KOMUNITAS BAGI APARAT PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MENGHADAPI ARUS MODERNISASI POLITIK Supriyadi.....	362
36. DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI Susan Fitriasari.....	376
37. URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN Triwahyuningsih.....	384
38. PENERAPAN PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MEMAHAMI KONSEP HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) Winarno.....	391
39. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MENYADARKAN WARGANEGARA AKAN HAK DAN KEWAJIBAN Yunisca Nurmalisa.....	396
40. KAJIAN MAKNA NILAI HISTORIS DAN BUDAYA DALAM <i>NATIONAL COSTUME</i> DI AJANG INTERNASIONAL SEBAGAI JATI DIRI BANGSA Agustinus Tampubolon.....	403
41. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA CITA DAN REALITA Triyanto.....	417
42. UPAYA MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DALAM MEMBINA BUDAYA DISIPLIN UNTUK MEWUJUDKAN KAREKTER BANGSA Dede Iswandi.....	423
43. REAKTUALISASI EMPAT KONSENSUS KEBANGSAAN INDONESIA UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (<i>SMART AND GOOD CITIZENS</i>) Efi Miftah Faridli.....	430

44.	PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN (<i>ECONOMIC CIVIC</i>) PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS Epin Saepudin.....	440
45.	MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN Pebriyenni.....	453
46.	PENGUATAN JATIDIRI PKn MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015 Riyan Yudistira.....	463
47.	REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Samsuri.....	478
48.	PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENDUKUNG KARAKTER KEJUJURAN SISWA DI SEKOLAH MELALUI PKn Shilmy Purnama.....	485
49.	PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN CALON GURU PPKn MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS <i>BLENDED</i> <i>LEARNING</i> DI PERGURUAN TINGGI Siti Awaliyah.....	492
50.	MENANAMKAN KEBAJIKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sylvester Kanisius.....	501
51.	REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Wildan Nurul Fajar.....	509
52.	KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR Julien Biringan.....	517
53.	MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM PEMIKIRAN POSTMODERNIS Ana Andriani.....	530
54.	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF UNTUK MENGEMBANGKAN WAWASAN GLOBAL PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Mukhamad Murdiono.....	539
55.	UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Marintan Lasrida Sitorus.....	551

56.	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KEKINIAN DI INDONESIA Nurhadianto	568
57.	TANTANGAN PKn SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI Nurharmi.....	579
58.	KERANGKA PEMIKIRAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Petrus Irianto	591
59.	URGENSI PENILAIAN RANAH AFEKTIF DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Rohani	599
60.	RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PENDIDIKAN DAMAI DALAM MEMBANGUN WARGANEGARA DEMOKRATIS DI SEKOLAH Candra Cuga.....	610
61.	PANDANGAN FILSAFAT ESSENSIALISME DALAM MEMPERKOKOH PKn SEBAGAI <i>INTEGRATED SYSTEM OF KNOWLEDGE</i> Eli Karliani	622
62.	PRAKSIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH : BELAJAR DARI PENGALAMAN Leni Anggraeni.....	634
63.	KOSMOPOLITANISME APAKAH ANCAMAN ATAU TANTANGAN BAGI PENGEMBANGAN NASIONALISME INDONESIA? Lili Halimah	645
64.	MEMOTRET CIVIC ENGAGEMENT DI INDONESIA Sunarto Amus	656
65.	EKSISTENSI PKN DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN INSTITUSI ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN Susena.....	669
66.	PERAN AP3KNI SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ETNOPEDAGOGIK UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS KEBANGKITAN NASIONAL MODERN Iim Siti Masyitoh.....	674
67.	PENGUATAN JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Deny Setiawan.....	684

68.	KONSTRUK KURIKULER PENDIDIKAN AFEKSI SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARA Nani Nur'aeni.....	696
69.	PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Dwi Iman Muthaqin	711
70.	METODE PEMBELAJARAN KLIK BERBASIS <i>MIND MAP</i> DALAM MEMANFAATKAN CARA KERJA OTAK SEBAGAI MESIN ASOSIASI UNTUK MENGATASI KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Dadang Sundawa.....	720
71.	REVITALISASI GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS: MENJAWAB TANTANGAN BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) PADA LEVEL PUBLIK Sri Wahyuni Tanszil.....	735
72.	<i>CITIZEN POLITICS</i> (POLITIK KEWARGANEGARAAN) SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU DALAM KAJIAN PKn: TANTANGAN ANALISIS FILOSOFIK Halking.....	743
73.	ESENSI SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MEMBAYAR PAJAK DI PROVINSI JAWA BARA Prayoga Bestari.....	757
74.	REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI Rini Irianti Sundary.....	767
75.	PENGUATAN JATI DIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGAKTUALISASIKAN MORALITAS PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBENTUK <i>GOOD CITIZEN</i> Triana Rejekiningsih.....	775
76.	PROSES PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER Ruslan.....	789
77.	MEMAKNAI HAKIKAT DAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA Yuyus Kardiman.....	798

78. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONTEKSTUAL BERBASIS <i>LIVING VALUES EDUCATION</i> : SEBUAH PENGALAMAN PRAKSIS Kokom Komalasari.....	811
79. URGENSI PENGUATAN PKN SEBAGAI PROGRAM SOSIAL-KULTURAL KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA KARAKTER SISWA Rahmat.....	824
80. ANTIKORUPSI SEBAGAI SUMBER MATERI DAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH Harmanto dan Totok Suyanto	839
81. PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA, Wahyu Widodo	849
82. STUDI PENELUSURAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 dan S1 PPKn PIPS-FKIP UNIVERSITAS TERBUKA Syaiful Mikdar, Sriyono, Sri Sumiyati	861
83. PENYELARASAN KURIKULUM S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) Sriyono, Syaeful Mikdar dan Yos Sudarso.....	877
84. PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA SIKAP DEMOKRATIS SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO Elly Hasan Sadeli	900
85. MEMBANGUN WARGA NEGARA SADAR KONSTITUSI MELALUI REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sri Suneki	907
86. PENTINGNYA PEMAHAMAN KE- INDONESIAAN BAGI WARGA BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI (KASUS KE INDONESIAAN DI PAPUA) Bernarda Meteray	913
87. INKLUSI DEMOKRASI TERHADAP MINORITAS (Tantangan Indonesia dalam Membangun Politik Inklusi Demokratis) Halili.....	923

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN

oleh
Triwahyuningsih

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, di lain pihak sistem demokrasi itu juga tidak bisa dipaksakan dari luar atas suatu masyarakat atau suatu bangsa. Demokrasi dalam suatu masyarakat dapat ditumbuhkan seiring dengan pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan *learning process*, yang tumbuh berkembang secara bertahap menuju suatu kematangan demokrasi (Zamroni, 2013 : 32-33).

Menurut Azyumardi Azra (2003: 17) kebutuhan mendesak bagi bangsa dalam membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa alasan. *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political literacy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya *political apathism* yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional dan social, memiliki keadaban demokrasi dan demokratis berkeadaban merupakan tuntutan dan keniscayaan.

Menurut Yudi Latif (Kompas 16 Maret 2015) perwujudan demokrasi permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan (yang berorientasi keadilan social) tercegat oleh hambatan-hambatan cultural, institusional dan structural. Secara cultural , politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etika mengalami kemunduran. Pada tingkat institusional demokrasi yang ingin memperkuat daulah rakyat justru memperkuat segelintir orang. Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi dan kepuasan dan daulat rakyat justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat. Pada tingkat structural , kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi "liberal" tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi social-ekonomi masyarakat Indonesia justru dapat melemahkan demokrasi.

Hasil survai Kompas (15 Juli 2013 : 40) tentang " **Pemilu di mata Pemilih Pemula**" sebanyak 46,67 % jarang berbicara terkait politik. Mayoritas menganggap politik sebagai pembicaraan yang kurang menarik, topic pemilu hanya terdengar sayup-sayup. Para pemilih pemula itu belum paham soal pemilihan umum. Padahal Proklamator kita , Bung Karno sejak lama menempatkan kaum muda sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena mereka adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan Negara.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih dijadikan indikator keberhasilan pemilu. Demokrasi di Indonesia menurut Olle Tornquist dan Kristian Stokke sebagaimana dikutip oleh Lucy Djani (Kompas 11 Maret 2014: 7), mengalami defisit akibat lemahnya representasi politik. Buruknya relasi antara pemilih dan politikus membuat kualitas demokrasi di Indonesia rendah secara substansial.

Urgensi Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik adalah sebuah proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik sebagai proses dialogis antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma, symbol politik yang dianggap ideal dan baik (Ramlan Surbakti, 1999:117).

Pendidikan Politik (*political education, political socialization, citizenship training*) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Jika dikaitkan dengan faham kedaulatan rakyat atau demokrasi, maka rakyat harus mampu menjalankan tugas-tugas partisipasi. Di dalam negara demokrasi, idealnya rakyat dididik secara kontinu berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di negara tersebut. (Rusadi Kantaprawira, 1977: 54).

Almond dan Coleman menulis fungsi pendidikan politik “ yang ada dalam setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya” bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda (Rusadi Kantaprawira, 1977: 56).

Adanya petugas-petugas politik yang berkualitas tinggi hampir selalu merupakan hasil dari pendidikan politik. Sebagaimana dikemukakan Rusadi Kantaprawira (1977: 55):

“Datangnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas tidak semata-mata merupakan mitos. Dengan demikian masyarakat luas perlu terus ditingkatkan pengetahuan politiknya, agar dapat menjadi insane-insan politik yang sadar atas peranannya, mengetahui hak-haknya dan mempunyai tanggungjawab. Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal-hal yang baik/konstruktif dan meninggalkan hal-hal yang buruk berdasarkan konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar sumber –sumber kekayaan rohani (spiritual resources) yang dimilikinya. Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik, sedemikian rupa harus merata ke semua lapisan masyarakat baik vertical maupun horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak semata-mata merupakan monopoli dari elit saja, walaupun seringkali elit merupakan elemen penggerak yang vital”

Hendak ke mana masyarakat dididik tentang pemikiran-pemikiran politik, masalah-masalah politik, daya tanggap politik sangat erat kaitannya dengan kebudayaan politik dan orientasi-orientasi politik. Menampilkan budaya politik partisipan sangat penting, sebab akan berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi yang nyata atau demokrasi tidak terbatas wacana. Dalam kenyataan meskipun suatu negara menganut sistem politik demokrasi, seperti Indonesia tidak serta merta kemudian kehidupan politiknya demokratis. Apabila dikaji factor kendalanya antara lain, belum berkembangnya budaya politik partisipan

Seperti dikatakan Aristoteles filosof politik dan Bryce ilmuwan politik yang

mendalami demokrasi, intinya mereka sepaham bahwa demokrasi itu dilanjutkan dan dipertahankan oleh warga negara yang aktif dalam urusan politik dan penyebaran informasi yang tinggi mengenai masyarakat serta memiliki tanggung jawab politik yang tinggi. (Cholisin, 2013 : 9). Almond dan Verba menyebutkan budaya politik yang demoktaris, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demoktarik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “ suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci bagi sebuah sikap politik, dan keyakinan akan kemampuan tersebut merupakan kunci bagi terbentuk dan terpeliharanya demokrasi. Artinya, warga negara mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan. Kosekuensi selanjutnya adalah, kalangan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memperhatikan kepentingan warga masyarakat. Kalau tidak demikian, warga masyarakat akan mengalami *deprivasi*, sehingga mereka menjadi kecewa dan meninggalkan pemerintah. Masyarakat tidak akan memilih pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya, kalau warga masyarakat merasa kompeten untuk terlibat dalam proses politik, implikasinya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Rakyat menjadi sasaran dan objek kebijaksanaan pemerintah yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Afan Gaffar (2004:101) .Di sinilah pentingnya menampilkan peran serta budaya politik partisipan bagi setiap warga negara, agar pemerintah terkontrol dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kepentingan rakyat.

Menampilkan peran serta budaya politik partisipan atau peran warga negara dalam kehidupan politik, dapat dilakukan pada tingkat makro politik (Pemerintahan tingkat nasional) dan mikro politik (pemerintahan lokal) seperti pada pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dll. Wujud partisipasi itu misalnya mengkritisi suatu kebijakan, melakukan negosiasi dengan lembaga berwenang, melakukan upaya penekanan lewat unjuk rasa dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam budaya politik partisipas ada unsure kepatuhan terhadap norma, peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan bahwa partisipasi untuk mengkritisi, memecahkan berbagai masalah kehidupan politik disertai tanggung jawab Tanggung jawab itu dapat diwujudkan apabila dalam penerapannya budaya politik partisipan sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila (Cholisin, 2013 : 10). Nilai-nilai tersebut, antara lain :

- a. Religious (bukan sekuler)
- b. Bhineka Tunggal Ika (Pluralisme);
- c. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Kebangsaan;
- d. Ciri kekeluargaan;
- e. Gotong Royong;
- f. Musyawarah;
- g. Cinta kemerdekaan;
- h. Cinta tanah air;
- i. Cinta persatuan dan kesatuan;
- j. Semangat solidaritas.

Le
politik part
pemerintah
budaya pol
a. Per
b. Per
c. Per
das
d. Per
berl
(pri
Sela
penerapan
• Me
am
• Me
Ke
pe
• Me
• Me
int
ne
Me
memungki
yaitu samp
psikologis
Seseorang
secara me
nilai itu, s
juga mmer
M
melalui:
1. Bahan-
lain-lai
2. Siaran
dapat d
3. Lemba
serta p
4. Berken
menam
dengan

Demokra
M
bermasyar

Lebih lanjut Cholisin, (2013 :10) menuliskan bahwa orang yang berbudaya politik partisipan juga memiliki ciri khas percaya diri untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian setiap warga negara dapat menampilkan peran serta budaya politik partisipan dalam bentuk :

- a. Peran aktif, yakni memberikan masukan, mengkritisi kebijakan public;
- b. Peran pasif, mematuhi kebijakan pemerintah;
- c. Peran positif, yakni meminta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya supaya sebagai warga negara dapat hidup sejahtera;
- d. Peran negative, yakni menolak segala bentuk intervensi pemerintah yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah urusan pribadi (privasi).

Selanjutnya, berikut contoh konkrit bentuk penampilan peran serta atau penerapan budaya politik partisipan oleh warga negara :

- Memberikan masukan dalam pembuatan Perdes, Perda, PP, UU dan amandemen konstitusi;
- Memberikan kritik (menunjukkan kebaikan dan kelemahan) dari Perdes, Perda, Kepres, PP, UU dan amandemen konstitusi dalam upaya perubahan dan perbaikan;
- Mematuhi Perdes, Perda, Kepres, PP, UU, UUD;
- Menolak berbagai perlakuan pemerintah, kebijakan pemerintah yang bersifat intervensi hak-hak privasi atau berakibat tereksplotasinya hak-hak warga negara.

Menurut Alfian dikutip oleh Cholisin (2013 : 4) oleh ada dua factor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang, yaitu sampai berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik, yaitu factor emosional-psikologis yang berasal dari hatinya, kedua factor rasio yang berasal dari otaknya. Seseorang akan menerima nilai-nilai Pancasila bilamana kedua factor itu terpenuhi secara memuaskan, yaitu baik secara emosional-psikologis hatinya menerima nilai-nilai itu, sebagai cocok, dengan dirinya, maupun secara rasional akal sehat otaknya juga menerimanya sebagai sesuatu yang sesuai dengan dirinya.

Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui:

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (readable, legible) seperti surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum;
2. Siaran seperti radio yang dapat didengar (audable) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio visual)
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti di masjid, gereja serta pendidikan formal dan nonformal. (1977: 56).
4. Berkembangnya teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk menambah wawasan tentang pengetahuan politik, seperti melalui internet, web dengan berbagai variasinya yang sifatnya *on line*.

Demokrasi Berkeadaban

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah

menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Azyumardi Azra, 2003 : 109-110).

Pengertian demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Azyumardi Azra, 2003: 110).

Sementara itu jika ditelusuri dari sisi terminologis terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan demokrasi, diantaranya yaitu pendapat *Sidney Hook* yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2003: 110) menyatakan bahwa “demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”. Sedangkan menurut *Philippe C. Schmitter* dan *Terry Lynn Karl*, “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih” (Azyumardi Azra, 2003: 110). Dan menurut pendapat *Henry B. Mayo* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2009 : 117) menyatakan bahwa:

“sistem politik yang demokratis merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah diambil atas dasar kesepakatan bersama dan prinsip kesamaan politik.

Menurut Azyumardi Azra (2003: 79-80) , untuk membangun tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Rasa hormat dan tanggung jawab;
- b. Bersikap kritis;
- c. Membuka diskusi dan dialog;
- d. Bersikap terbuka;
- e. Rasional;
- f. Adil
- g. Jujur

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan

menampilkan sosok warga negara otonom yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara mandiri. Lebih lanjut Asyumardi Azra (2003: 81-82) Sebagai warga negara otonom, warga negara mempunyai karakteristik lanjutan, yaitu :

- a. Memiliki kemandirian, tidak mudah dipengaruhi, dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan politik;
 - b. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara;
 - c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi;
 - d. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun;
 - e. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi. Karena itu, warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional yaitu :
5. Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (*culture of law*)
 6. Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (*process of law making*)
 7. Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsive (*content of law*)
 8. Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggungjawab.

Pada sisi lain Yudi Latif (2012 : 475) mengatakan bahwa :

“ Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional. Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekedar alat teknis, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun dictator proletariat, yakni sekedar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalis, sosialis maupun yang lain.”

Selanjutnya dijelaskan Yudi Latif (2012 : 475-476) bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yaitu :

- 1) kerakyatan (daulat rakyat);
- 2) permusyawaratan (kekeluargaan);
- 3) hikmat kebijaksanaan

Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan member jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”

Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Karena itu demokrasi

Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila. Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsesual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh "mayorokrasi" dan "minorokrasi".

Dalam demokrasi permusyawaratan, sesuatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 prasyarat; a). Didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subyektifitas ideologis dan kepentingan b). Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang bukan demi kepentingan perorangan atau golongan c). Berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negative) d). Bersifat imparisial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pihak (minoritas terkecilpun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi dan konsesus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar itu, pemungutan suara (voting) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itupun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnyajesejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan (Yudi Latif, 2012 : 477-480).

Daftar Rujukan

- Afan Gaffar. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Cholisin. 2013. *Budaya Politik*. Jogjakarta PKn H Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jogjakarta.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Rusadi Kantaprawira. 1977. *System Politik Indonesia*. Bandung: Tribisana Karya.
- Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multi Kultural*. Jogyakarta : Ombak.
- Kompas, 15 juli 2013
- _____ 11 Maret 2014
- _____ 16 Maret 2015